



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/31 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 180/010 TAHUN 2023 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/010 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023/2024 dan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/010 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/010 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda); dan
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/13 tanggal 05 Januari 2023 hal Penyusunan Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/010 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 180/31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 180/010 TAHUN 2023
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2023

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan Perangkat Daerah			
1.	Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah	Adanya pengembangan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024		

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
4.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024		Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.	Verifikasi Dokumen Yang Lengkap Dan Sah		Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
6.	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah		Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
7.	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		-
8.	Sensus Barang Milik Daerah		-
9.	Kodefikasi Barang Milik Daerah		-
10.	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
11.	Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mengatur tentang Standar/Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
12.	Standar Honorarium Dan Biaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Mengatur tentang Standar Honorarium dan Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku sebagai nilai batas maksimum honorarium dan biaya.
13.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta target waktu pencapaiannya.
14.	Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru
15.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026		
16.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024		Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			Daerah
17.	Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Jawa Tengah		Hasil Riset
18.	Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim Jawa Tengah Tahun 2023-2060		Amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
19.	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
20.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Menyesuaikan perubahan kriteria modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;</p> <p>b. Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			<p>c. Ditujukan sebagai media pencatatan dan pelaporan realisasi investasi penanaman modal bagi sektor usaha mikro yang tidak tercatat dalam sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagai upaya meningkatkan realisasi investasi penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.</p>
21.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah		<p>a. Pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem online single submission risk based approach (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>b. Regulasi terkait dengan perizinan berusaha berkembang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian dengan regulasi perizinan terbaru;</p> <p>c. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah ditujukan sebagai media pemrosesan perizinan berusaha yang dilaksanakan di luar sistem OSS RBA sehingga memungkinkan terjadi disharmoni pengaturan dengan</p>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			perkembangan peraturan.
22.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025		Penyesuaian setelah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
23.	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal		
24.	Konfirmasi Status Wajib Pajak Di Provinsi Jawa Tengah		Melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah
25.	Rencana Kontigensi, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Kajian Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	-
26.	Dokumen Tim Reaksi Cepat Tingkat Provinsi Jawa Tengah		Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK tanggal 04 April 2022 tentang Pembentukan Tim reaksi cepat (TRC) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia
27.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun		Menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
	2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah		Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana
28.	Mitigasi Bencana Pada Daerah Pesisir Dan Pulau Terluar (Penanganan Banjir Rob/Banjir Pesisir)		Menyesuaikan regulasi mitigasi bencana daerah pesisir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
29.	Dokumen Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan/Atau Limbah B3 Skala Provinsi Jawa Tengah		Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
30.	Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Penyediaan Logistik Dan Sarpras Penanganan Darurat Bencana		Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
31.	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Untuk Penyediaan Logistik Dan Sarpras Penanganan Darurat Bencana		Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
32.	Pedoman Pemerintah Daerah tentang Penetapan Satus Keadaan Darurat Bencana		Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
33.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	-

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
	Pengarustamaan Gender	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	
34.	Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Jawa Tengah		-
35.	Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah		-
36.	Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak Provinsi Jawa Tengah		-
37.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		-
38.	Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Untuk memperlancar proses permohonan Hak Pakai atas tanah aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
39.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
40.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Air Limbah Domestik		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Air Limbah Domestik

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
41.	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan
42.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
43.	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif		
44.	Perubahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan menyesuaikan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
45.	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
46.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023-2028	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
47.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
48.	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data dan perlindungan sistem elektronik pemerintah melalui sertifikat elektronik
49.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
50.	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
51.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tekonologi		Menyesuaikan dengan perkembangan dan inovasi teknologi informasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
	Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
52.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		Menyesuaikan dengan perkembangan beberapa layanan manajemen informasi yang telah terintegrasi
53.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
54.	Pedoman Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan untuk semua BUMD Provinsi Jawa Tengah terkait pedoman pengelolaan perusahaan
55.	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah
56.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal	Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal dan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
57.	Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Perubahan menyesuaikan kenaikan tarif
58.	Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Perubahan menyesuaikan kenaikan Standarisasi Honorarium
59.	Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Perubahan menyesuaikan kondisi saat ini
60.	Klasifikasi Arsip Di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tanggal 30 November 2022 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
61.	Penyaluran Belanja Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Mendukung pelaksanaan program penurunan inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan intervensi harga di tingkat konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
62.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Biro Organisasi SETDA	Menambahkan tugas dan fungsi yang belum

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
	tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	terakomodir di Peraturan Gubernur sebelumnya
63.	Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Jawa Tengah		Pembentukan Rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Mata, aset dan sumber daya manusia peralihan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Balai Paru dan Balkesmas)
64.	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah		Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
65.	Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah		
66.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
67.	Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Tindaklanjut Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
68.	Tunjangan Risiko Dan Insentif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah		Tindaklanjut Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
69.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian setelah ditetapkannya : a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
70.	Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan/Stau Termasuk Di Dalam Appendix CITES		Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
71.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 terdapat materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, yaitu terdapat pada : a. Pasal 16 ayat (6) ketentuan lebih lanjut

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			<p>mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>b. Pasal 18 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>
72.	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	-
73.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara di Jawa Tengah termasuk kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
74.	Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak Dan Sedekah Aparatur Sipil Negara	Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah guna membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah
75.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah*	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian beberapa ketentuan pasca pandemi Covid-19 dan partisipasi dalam mengurangi angka kemiskinan
76.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah*		Menyesuaikan perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan
77.	Tata Cara Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Rekomendasi Pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah*	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mengatur mengenai Pemanfaatan Tanah dan Pemberian Rekomendasi pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah di Kawasan PRPP
78.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah*		Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
79.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah*	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Menyesuaikan perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan
80.	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*	Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
81.	Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan*	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	-

B. Rancangan Peraturan Gubernur Kumulatif Terbuka	
1.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
3.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO